



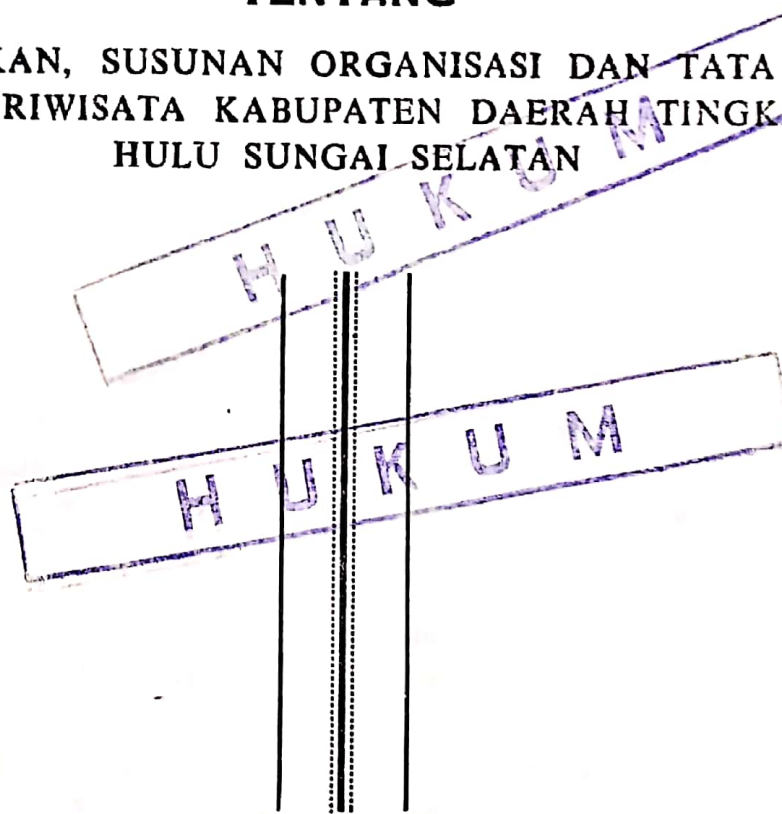
35 071
Dem
H

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 11 TAHUN 1991

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN**



BAGIAN HUKUM

**SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN**

TAHUN 1991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
N OMOR : 3 TAHUN 1992 SERI D NO 6 SERI 3 .

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 11 TAHUN 1991

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERIWIJATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi dengan ti-
tik berat pada Daerah Tingkat II, diperlukan peng-
galian potensi-potensi Daerah diantaranya pengga-
lian sumber-sumber Bidang Kepariwisata pada Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- b. bahwa dalam usaha meningkatkan pengembangan Kepa-
riwisata di Daerah sebagai salah satu usaha un-
tuk pemerataan pendapatan dan pembangunan perlu -
dibentuk Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Ting -
kat II Hulu Sungai Selatan ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konside-
ran diatas, perlu diadakan Pembentukan, Susunan -
Organisasi dan Tata kerja Dinas Pariwisata Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dengan
menetapkannya didalam suatu Peraturan Daerah .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Peneta-
pan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ten-
tang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pokok Pe-
merintahan di Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang -
Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan Dalam Bi-
dang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974
tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 19
77 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi
dan Tatakerja Dinas Daerah ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kaliman-
tan Selatan Nomor 14 Tahun 1990 tentang Penyerahan
sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat
I Kalimantan Selatan dalam Bidang Kepariwisata -
kepada Daerah Tingkat II .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Hulu Sungai Selatan .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU
SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANI-
SASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. D a e r a h : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II -
Hulu Sungai Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- c. Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat-
II Hulu Sungai Selatan ;
- d. Dinas Pariwisata : adalah Dinas Pariwisata Kabupaten -
Daerah Tingkat II hulu Sungai Selatan;

- e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
- f. Cabang Dinas : adalah Cabang Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas : adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

B A B II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAGIAN PERTAMA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kepariwisata Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, sedangkan dalam bidang Administrasi dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Kepariwisata dan tugas-tugas perbantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepadanya .

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pasal 4 dalam Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- b. Melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan terhadap usaha sarana wisata ;
- c. Melakukan pendataan, pendaftaran dan pemberian izin usaha sarana wisata ;
- d. Menyusun program pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan terhadap obyek-obyek wisata dan penamanan kawasan lokasi wisata ;
- e. Menyusun dan membuat laporan terhadap pembinaan, pengawasan, pemantauan, pendataan, pendaftaran, pemberian izin dalam pengelolaan kepariwisataan Daerah .

B A B III

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Sarana dan Wisata Remaja ;
- d. Seksi Obyek dan Atraksi Wisata ;
- e. Seksi Bimbingan Masyarakat dan Informasi Wisata .

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas .
- (3) Bagan susunan Organisasi sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan,

B A B IV

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN SEKSI 'SEKSI DINAS PARIWISATA

Bagian Pertama

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 pada Peraturan Daerah ini sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat ;
- b. Melaksanakan urusan kepegawaian ;
- c. Melaksanakan urusan pengelolaan keuangan .

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan .

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga ;

- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan urusan kepegawaian dan pembinaan kesejahteraan pegawai ;
- (3) Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran pembiayaan dan pengelolaan keuangan .

Bagian Kedua

Seksi Sarana dan Wisata Remaja

Pasal 11

Seksi Sarana dan Wisata Remaja mempunyai tugas :

- a. Membantu dan mengawasi seluruh kegiatan pada usaha sarana Wisata dan Wisata Remaja ;
- b. Menyiapkan rekomendasi dan memproses perizinan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana dan Wisata Remaja mempunyai fungsi :

- a. Membantu pelaksanaan seluruh kegiatan Wisata Remaja yang ada di Daerah ;
- b. Mengawasi dan mengevaluasi seluruh sarana Usaha Wisata dan Wisata Remaja yang ada di Daerah ;
- c. Menyiapkan rekomendasi dan memproses perizinan kegiatan Usaha Wisata yang akan dilaksanakan.

Pasal 13

Seksi Sarana dan Wisata Remaja terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penginapan ;
- b. Sub Seksi Rumah Makan ;
- c. Sub Seksi Wisata Remaja .

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Penginapan mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan memberikan izin terhadap segala bentuk usaha penginapan ;
- (2) Sub Seksi Rumah Makan mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi seluruh kegiatan Usaha Rumah Makan ;
- (3) Sub Seksi Wisata Remaja mempunyai tugas melaksanakan - dan mengawasi semua bentuk usaha wisata remaja agar ti-mengarah kepada tujuan yang bersifat komersial .

Bagian Ketiga

Seksi Obyek dan Atraksi Wisata

Pasal 15

Seksi Obyek dan Atraksi Wisata mempunyai tugas :

- a. Memantau dan mengawasi kegiatan usaha obyek/atraksi wisata, sarana/lingkungan wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
- b. Mempersiapkan rekomendasi dan memproses perizinan .

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Obyek dan Atraksi Wisata mempunyai fungsi :

- a. Mengawasi kegiatan usaha wisata yang berada dilingkungan Wisata ;
- b. Mengevaluasi sarana lingkungan wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
- c. Menyiapkan rekomendasi dan memproses perizinan kegiatan yang dilaksanakan .

Pasal 17

Seksi Obyek dan Atraksi Wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Obyek, tempat Rekreasi dan Kawasan Wisata ;
- b. Sub Seksi Penyelenggaraan Atraksi ;
- c. Sub Seksi Hiburan Umum.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Obyek, Tempat Rekreasi dan Kawasan Wisata mempunyai tugas melakukan pengawasan obyek wisata dan melaksanakan penyelesaian permasalahan sehubungan dengan terdapatnya tempat rekreasi kawasan wisata.
- (2) Sub Seksi Penyelenggaraan Atraksi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan atraksi wisata.
- (3) Sub Seksi Hiburan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kegiatan rekreasi hiburan umum.

Bagian Keempat

Seksi Bimbingan Masyarakat dan Informasi Wisata

Pasal 19.

Seksi Bimbingan Masyarakat dan Informasi Wisata mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan serta pelayanan informasi mengenai kepariwisataan kepada masyarakat.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Bimbingan Masyarakat dan Informasi Wisata mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan bimbingan mengenai kepariwisataan;
- b. Memberikan pelayanan informasi mengenai kepariwisataan kepada masyarakat.

Pasal 21

Seksi Bimbingan Masyarakat dan Informasi Wisata terdiri:

- a. Sub Seksi Bimbingan Masyarakat ;
- b. Sub Seksi Informasi dan Promosi ;
- c. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Keterampilan.

CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Bimbingan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan tentang kepariwisataan kepada masyarakat ;
- (2) Sub Seksi Informasi dan Promosi mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi dan melaksanakan promosi kepariwisataan di Daerah ;
- (3) Sub Seksi Tenaga Kerja dan keterampilan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja dan peningkatan keterampilan dalam bidang kepariwisataan .

Pasal 23

- (1) Perubahan tipe organisasi,, penambahan dan pengurangan satuan organisasi pada Dinas Pariwisata akan diatur kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, pembentukan dan penerapannya akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

B A B VI

TATA KERJA

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala-kepala Seksi, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Sub Seksi pada Dinas Pariwisata wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Pasal 25

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada lingkungan Dinas-Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .

Pasal 26

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada lingkungan Dinas Pariwisata wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 27

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya .

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyampaikan laporan lebih lanjut kepada atasannya yang lebih tinggi .

Pasal 29

Kepala-kepala Seksi pada Dinas Pariwisata menyampaikan laporannya kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang menampung semua laporan dimaksud dan menyusunnya sebagai laporan berkala Dinas Pariwisata .

Pasal 30

Kepala Dinas dalam menyampaikan laporannya kepada atasannya, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja .

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Pariwisata wajib mengadakan rapat berkala .

B A B VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

(17 Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah .

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala-kepala Seksi pada Dinas Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan - atas usul Kepala Daerah .
- (3) Kepala Kepala Urusan dan Kepala-kepala Sub Seksi pada Dinas Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atau Usul Kepala Dinas .

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Segala Ketentuan yang berhubungan dengan urusan dibidang Kepariwisata yang sudah ada masih tetap berlaku sampai dengan diaturnya ketentuan yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku .
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Kepala - waian Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dialihkan menjadi tugas Dinas Pariwisata .

B A B IX

P E N U T U P

Pasal 34

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .
- (2) Segala sesuatu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku .

- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangannya dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan .

Kandangan, 30 Desember 1991.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II Hulu Sungai Selatan

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan,

Ketua,

Cap. dtt.

M.YUSRAN ANWAR, BA

Cap. dtt.

H. MOH. ARLAN, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan :

Nomor : 3

Pada tanggal : 23 Maret 1992

Tahun : 1992.

Seri : D

Nomor seri : 3

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan :

Nomor : 94/SK-1/KUM.

Tanggal : 10 Maret 1992.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan,



Drs. H. Ideris Apsani
Pembina

Nip. 010041008.-

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DINAS

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Hulu Sungai Selatan -
Nomor : 11 Tahun 1991.
Lembaran Daerah Nomor : 3 Tahun -
1992 Seri D NO. Seri 3.

SUB BAGIAN
TATA USAHA

URUSAN
UMUM

URUSAN
KEPEGAWAIAN

URUSAN
KEUANGAN

SEKSI
SARANA & WISATA
REMAJA

SEKSI
OBYEK & ATRAKSI
WISATA

SEKSI
BIMBINGAN MASYARAKAT
& INFORMASI WISATA

SUB SEKSI
PENGINAPAN

SUB SEKSI
RUKAH MAKAN

SUB SEKSI
WISATA REMAJA

SUB SEKSI
OBYEK, TEMPAT
REKREASI & KA-
WASAN WISATA

SUB SEKSI
PENYELENGGARAAN
ATRAKSI

SUB SEKSI
HIBURAN UMUM

SUB SEKSI
BIMBINGAN
MASYARAKAT

SUB SEKSI
INFORMASI &
PROMOSI

SUB SEKSI
TENAGA KERJA &
KETERAMPILAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II Hulu Sungai Selatan
Ketua,

Cap. dtt.

M.YUSERAN ANWAR, BA

UPTD

UPTD

CABANG DINAS

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan,

Cap. dtt.

H. MOH. ARLAN, SH